

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Dwi Moni Estuti¹, Teti Anggita Safitri²

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta^{1&2}
dwimoniestuti20@gmail.com¹); tetianggita@unisayogya.ac.id^{2*})

ABSTRACT

Analysis of the local government's financial performance is the most important thing. This is because it provides an overview of what the region will do to increase local revenue. The research objective was to determine the ratio of government financial independence, the ratio of government financial effectiveness, the ratio of the degree of decentralization, and the ratio of regional financial dependence of the Kulon Progo Regency government in 2019-2021. This research is quantitative descriptive research. The data used is secondary data in the form of the 2019-2021 Kulon Progo Regency Government Financial Report. The independence ratio of the Government of Kulon Progo Regency is in the low category. The realization of PAD revenue for the Government of Kulon Progo Regency is included in the very effective category, as evidenced by a ratio that exceeds the value of 100%. The degree of decentralization of the Kulon Progo Regency Government based on criteria shows low criteria. The level of dependence of the Government of Kulon Progo Regency is very high. Kulon Progo Regency can be improved by optimizing the potential of PAD to achieve an independent area. The independence of the Kulon Progo Regency government is below 25% in the low category.

Keywords: *Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Decentralization Degree Ratio, dependency ratio.*

ABSTRAK

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang paling penting, hal ini dikarenakan memberikan gambaran apa yang akan dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan pemerintah, rasio efektivitas keuangan pemerintah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021. Rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masuk kategori rendah. Realisasi penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam kategori sangat efektif dibuktikan dengan rasio yang melebihi nilai 100%. Derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan kriteria menunjukkan kriteria yang rendah. Tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat tinggi. Kabupaten Kulon Progo dapat ditingkatkan dengan dengan mengoptimalkan potensi PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Kemandirian pemerintah Kabupaten Kulon Progo berada di bawah 25% dalam kategori rendah.

Kata kunci: *Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Derajat desentralisasi, Rasio Ketergantungan*

1. PENDAHULUAN

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah tidak hanya diberikan kebebasan dalam mengelola sumber daya daerah, namun harus memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya daerah yaitu tuntutan akuntabilitas sektor publik (Sari et al., 2021). Kinerja keuangan daerah merupakan bagian dari pekerjaan dalam domain kondisi finansial daerah, mencakup penerimaan dan pengeluaran daerah berdasarkan metrik finansial yang ditetapkan oleh kebijakan periode anggaran atau peraturan perundang-undangan (Talumewo et al., 2020). Dalam Rondonuwu (2016), Ibnu Syamsi mencatat bahwa kinerja keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah menjadi tolok ukur seberapa jauh daerah mampu menemukan dan melakukan pengelolaan sumber-sumber bagi finansial daerah untuk memenuhi tuntutan pemerintah, masyarakat, dan pembangunan daerah, sehingga daerah menjadi kurang bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menggunakan uang yang diperoleh melalui pengelolaan sumber daya keuangan bagi kepentingan publik, tetapi hal ini dibatasi sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.

Menurut Sari et al., (2021) analisis kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang paling penting, hal ini dikarenakan dengan adanya analisis kinerja keuangan daerah akan memberikan gambaran apa yang akan dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Lebih lanjut Sari et al., (2021) mengemukakan bahwa masih banyak daerah yang tidak melakukan analisis kinerja keuangannya. Melihat masih rendahnya analisis kinerja keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, menjadikan penelitian tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menarik untuk diteliti.

Di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah sudah dijelaskan bahwa pendapatan daerah ialah pendapatan yang dimiliki daerah yang dapat meningkatkan nilai kekayaan suatu daerah pada waktu tertentu. Pendapatan daerah juga dapat diartikan sebagai segala bentuk penerimaan daerah atau berkurangnya utang yang berasal berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Halim, 2011).

Gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada laporan keuangan. Pengukuran kinerja merupakan sebuah langkah yang digunakan untuk melihat apakah pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dipertahankan atau dievaluasi (Ulun, 2020). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah metode pengukuran keuangan dan non-keuangan, ada upaya dalam membantu dalam pelaksanaan strategi pengelolaan keuangan oleh sistem yang mengukur kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2018). Teknik yang bisa saja digunakan adalah analisis terhadap keuangan dari pelaporan APBD yang telah usai dikerjakan (Halim dan Kusufi, 2014).

Kinerja keuangan pemerintah menurut rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dapat dikategorikan sangat efektif. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja keuangan pemerintah. Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan dapat dikategorikan tidak efisien. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Pemerintah Daerah dalam satu periode ke Kota Tangerang Selatan periode berikutnya tidak memiliki kenaikan yang stabil, malah cenderung turun secara fluktuatif.

Sesuai dengan Widiyaningsih & Prihatiningsih (2021) menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Surakarta secara umum dikatakan baik. Kinerja Pendapatan baik dilihat Varians Pendapatan Daerah Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari derajat desentralisasi, Rasio

Ketergantungan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, dan Derajat Kontribusi BUMD, Kinerja keuangan belanja Kabupaten Surakarta baik didasarkan pada keterserapan dan kesesuaian belanjanya.

Salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Kulon Progo. Menurut yang informasi dilansir oleh *Republika.co.id* (2021), “DPRD Kabupaten Kulon Progo meminta agar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo lebih teliti dan hati-hati dalam tata kelola penggunaan APBD tahun 2021 untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau sebagai temuan dari BPK”. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih kurang. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti memilih Kabupaten Kulon Progo sebagai subjek penelitian.

Melihat masih kurangnya pemerintah daerah melakukan analisis kinerja keuangan serta masih kurangnya kinerja keuangan pada Kabupaten Kulon Progo, sehingga penting untuk dilakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan unsur penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Halim (2011) berpendapat bahwa dalam menjalankan otonomi daerah, suatu daerah harus memiliki kemampuan seperti dukungan keuangan, karena keuangan merupakan faktor utama guna menerapkan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah di dalam mengelolakeuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu tertib, efisien dan efektif, ekonomis, transparan (keterbukaan) dan bertanggung jawab serta tetap memperhatikan manfaat pada masyarakat (Mahardika dan Artini, 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Wulandari & Iryanie (2018) APBD adalah program pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang diwujudkan dalam satu bentuk uang.

APBD dapat didefinisikan sebagai perkiraan dari suatu pemerintahan daerah terkait perencanaan mengenai keuangan yang nantinya akan direalisasikan per tahun (Nugraha, 2017). Penyusunan APBD berfungsi menyelenggarakan kebijakan ekonomi secara makro maupun sumber daya yang berasal dari daerah tersebut, pendistribusian sumber daya secara tepat serta dapat memberikan kesiapan kondisi pengelolaan keuangan secara tepat. Penyusunan APBD mempunyai tujuan menjadikan anggaran sebagai sarana serta

pengontrol guna mencegah terjadinya ketidak pemerataan dan kesenjangan di berbagai hal pada suatu negara ataupun daerah.

Kinerja Keuangan Daerah

Definisi kinerja yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu sebagai hasil dari suatu kegiatan yang akan segera dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan yang berkaitan pemanfaatan anggaran baik kuantitas dan kualitas yang bisa diukur. Kinerja mempunyai arti sebagai gambaran terkait suatu pencapaian dari program, kegiatan, kebijakan di dalam menciptakan sasaran, tujuan, visi serta misai organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya (Mahsum, 2012).

Menurut Syamsi dalam Herisistam (2015) kinerja keuangan daerah merupakan gambaran dari bagaimana pemerintah daerah mampu mengali serta mengelola sumber pendapatan asli daerah untuk membangun daerahnya, baik kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan pemerintahan, masyarakat serta pembangunan daerahnya dengan tidak sepenuhnya mengandalkan pada dana perimbangan. Pemerintah daerah memiliki kebebasan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam menggunakan keuangan daerah.

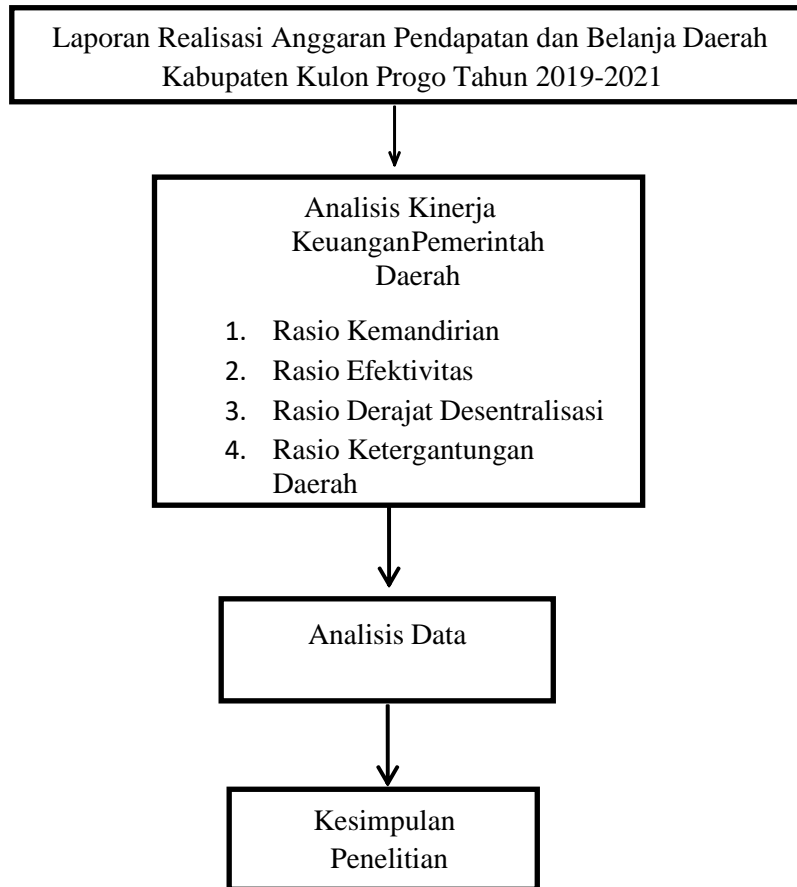
Pendapat Agustina dalam Paramita (2015) mendefinisikan kinerja keuangan daerah sebagai tingkat pencapaian di dalam bidang keuangan lingkup daerah baik meliputi pendapatan, belanja daerah dengan memakai indikator keuangan yang sudah ditetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari daerah untuk suatu periode anggaran.

Menurut Mardiasmo (2011) pengukuran kinerja keuangan daerah memiliki tiga tujuan. Pertama, tujuan dari pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, ukuran kinerja mengarahkan pemerintah agar fokus pada maksud dan tujuan program satuan kerja, dan akhirnya bisa meningkatkan keefektifan saat memberi pelayanan publik. Kedua, pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk pendistribusian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, pengukuran kinerja suatu keuangan juga bertujuan mewujudkan akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Menganalisis kinerja keuangan daerah menggunakan data yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021 yang diperoleh melalui www.bkad.kulonprogokab.go.id. Selanjutnya dilakukan analisis kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021. Setelah dilakukan perhitungan, selanjutnya melakukan analisis dari hasil perolehan perhitungan kinerja keuangan. Tahap akhir dalam penelitian ini adalah menghasilkan kesimpulan.

3. MODEL PENELITIAN



Gambar 1. Model Penelitian

4. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini tergolong di dalam jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2014), analisis kuantitatif deskriptif ialah jenis penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan data sedetail mungkin. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk melakukan perhitungan dan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 dengan menggunakan rasio keuangan.

Penelitian ini menggunakan data yang berupa angka-angka, sehingga tergolong kedalam jenis data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka, sehingga data tersebut dapat dilakukan analisis dengan metode statistik. Data yang dipakai di dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan populasi yang terdiri dari laporan keuangan Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan teknik pengambilan sampelnya adalah melalui model *purposive sampling*.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Model ini mengacu pada aturan pengambilan sampel menurut kriteria tertentu

dan telah ditentukan sebelumnya. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021 merupakan laporan yang akan di pakai sebagai sampel dalam penelitian ini.

Mengacu pada sumber data, sumber data penelitian ini adalah data sekunder karena data diperoleh dari Dinas Kabupaten Kulon Progo. Data diperoleh melalui perantara dari pihak lain dan tidak dilakukan secara langsung oleh peneliti. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021.

Metode dalam pengumpulan data di penelitian ini memakai studi kepustakaan dan dokumentasi. Pertama, studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mereview sejumlah jurnal, artikel, dan media lain yang dianggap relevan dan terkait dengan topik penelitian ini. Sedangkan dokumentasi adalah teknik pengumpulan atau pengumpulan, pencatatan dan analisis data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021 yang diperoleh melalui www.bkad.kulonprogokab.go.id.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini melakukan perhitungan dan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 dengan menggunakan rasio keuangan. Setelah dilakukan perhitungan dan mengukur, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan dari masing-masing komponen kinerja keuangan. Adapun rasio kinerja, yaitu:

Perhitungan rasio kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Mahmudi (2015) untuk mengetahui rasio kemandirian dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PAD = \frac{\text{Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat} + \text{Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi} + \text{Pinjaman Daerah (Hutang Daerah)}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

- 2) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah direncanakan dibandingkan pada target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil dari daerah tersebut (Syamsudin, 2015). Adapun rumus rasio efektivitas menurut Mahsun (2012) sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } t}{\text{Target PAD Tahun } t} \times 100\%$$

- 3) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi ialah perolehan dari perhitungan persentase rasio berdasarkan perbandingan antara total PAD dengan total penerimaan daerah (Putra, 2018). Adapun rumus dalam menghitung rasio derajat desentralisasi sebagai berikut.

$$= \frac{PAD}{\text{Total Penerimaan Daerah Pertahun}} \times 100\%$$

4. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah memperlihatkan bahwa tingkat kemampuan daerah di dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah baik melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diukur dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa menggunakan subsidi (Dana Perimbangan). Di dalam menghitung Rasio Ketergantungan dapat menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah Tahun}} \times 100\%$$

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah tingkat kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri dalam kegiatan pemerintah, pelayanan pada masyarakat yang sudah membayar pajak, pembangunan dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah (Halim, 2014).

Tabel 1 : Rasio Kemandirian

Tahun	Rasio Kemandirian(%)
2019	19,31
2020	21,05
2021	23,28

Sumber: Data Sekunder, 2022

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	PAD (Rp/Tahun)	Transfer Pusat +Provinsi + Hutang (Rp/Tahun)
2019	237.876.805.206	1.231.403.754.481
2020	254.422.026.357,32	1.208.628.737.276
2021	307.154.342.135,73	1.319.299.396.915

Sumber: Data Sekunder, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 berada di bawah 25% atau dalam kategori rendah sekali. Hal ini menunjukkan pola hubungan yang terbentuk yang berarti bahwa peran pemerintah pusat lebih banyak dari pada kemandirian pemerintah daerahnya.

Rasio kemandirian keuangan daerah yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam membiayai

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah direncanakan dibandingkan pada target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil dari daerah tersebut (Teti Anggita, 2018).

Tabel 3 : Rasio Efektivitas

Tahun	Rasio Efektivitas(%)
2019	102,80
2020	116,94
2021	124,55

Sumber: Data Sekunder, 2022

Tabel 4 : Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	PAD (Rp/Tahun)	Anggaran PAD (Rp/Tahun)
2019	237.876.805.206	231.402.904.457
2020	254.422.026.357,32	217.553.839.147
2021	307.154.342.136	246.596.642.331

Sumber: Data Sekunder, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 termasuk kategori sangat efektif karena berada di atas 100% yakni berturut-turut 102,80%, 116,94%, dan 124,55%. Kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD sesuai dengan target telah ditetapkan merupakan bentuk rasio efektivitas. Rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan kemampuan suatu daerah semakin baik. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan turunnya kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD.

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi ialah perolehan dari perhitungan persentase rasio berdasarkan perbandingan antara total PAD dengan total penerimaan daerah (Putra, 2018).

Tabel 5 : Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun	Rasio Derajat Desentralisasi (%)
2019	14,22
2020	16,07
2021	18,84

Sumber: Data Sekunder, 2022

Tabel 6 : Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun	PAD (Rp/Tahun)	Total Penerimaan Daerah (Rp/Tahun)
2019	237.876.805.206	1.672.270.191.535
2020	254.422.026.357,32	1.582.435.615.633
2021	307.154.342.136	1.582.435.615.633

Sumber: Data Sekunder, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 14%, 16%, dan 19% sehingga dikatakan rendah.

Perhitungan nilai derajat desentralisasi berdasarkan pada perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah pertahun. Hasil menunjukkan bahwa kontribusi PAD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 masuk kriteria yang kurang karena berada di bawah 50% dari total penerimaan daerah.

Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah memperlihatkan bahwa tingkat kemampuan daerah di dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah baik melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diukur dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa menggunakan subsidi (Dana Perimbangan).

Tabel 7 : Rasio Ketergantungan

Tahun	Rasio Ketergantungan (%)
2019	62,18
2020	60,03
2021	69,94

Sumber: Data Sekunder, 2022

Tabel 8 : Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan

Tahun	PAD (Rp/Tahun)	Total Penerimaan Daerah (Rp/Tahun)
2019	1.039.945.781.336	1.672.270.191.535
2020	949.989.624.014	1.582.435.615.633
2021	1.139.961.191.737	1.629.730.063.142

Sumber: Data Sekunder, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 menunjukkan di atas 50%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 sangat tinggi.

Perhitungan nilai ketergantungan keuangan daerah berdasarkan pada pendapatan transfer daerah sendiri dengan total pendapatan daerah pertahun. Rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2021 termasuk dalam kategori yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019-2021 jumlah total penerimaan daerah sangat tinggi.

6. KESIMPULAN

Rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masuk kategori rendah karena peran pemerintah lebih banyak daripada kemandirian daerah Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo dalam membiayai keuangan daerahnya. Realisasi penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam kategori sangat efektif karena penerimaan dari pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang ditargetkan. Derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan kriteria menunjukkan kriteria yang rendah karena kurangnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat tinggi karena semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Kemandirian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berada di bawah 25% atau dalam kategori rendah. Realisasi penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam kategori sangat efektif dibuktikan dengan rasio yang melebihi nilai 100%, dengan biaya pemerolehan PAD yang tergolong sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo cukup optimal menggali sumber-sumber PAD yang tersedia. Derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan kriteria menunjukkan kriteria yang rendah karena berada di bawah 50%. Sementara itu, tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat tinggi karena berada di atas 50% yang menandakan tingkat ketergantungan daerah pada total penerimaan daerah semakin tinggi.

Saran bagi Pemerintah Kulon Progo yaitu: 1) Tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat ditingkatkan dengan dengan mengoptimalkan potensi PAD untuk mencapai daerah yang mandiri; 2) Meningkatkan kemandirian keuangan melalui kinerja pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji dkk. (2022). *The Dynamics of Governance of Village-Owned Enterprise (Bumdes) Amarta in Strengthening the Economy of the Pandowoharjo Village Community During the Covid-19 Pandemic*. Atlantis Press
- Ariadin, M & Safitri, TA. (2021). Perilaku Manajemen Keuangan Pada Umkm Sentra Kerajinan Kayu Di Kabupaten Dompu. *Jurnal Among Makarti*.
- Boro, Ezekiel Et Al. 2023. The Role and Impact of Faith-Based Organisations In The Management Of And Response To Covid-19 In Low-Resource Settings. *Religion And Development* 1(1): 132–45.
- Hs, Sufyati, Et Al. (2022). *Mengenal Lebih Dekat Ekonomi Syariah*. Edited By Suwandi, Suwandi, Eureka Media Aksara.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Uii Press. Mahsun, M. (2010). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Bpfe. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Masruro, Anas; Musoli (2022). Pengaruh Stres Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Perawat Rs Pku Muhammadiyah Temanggung. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Uniss*. Vol.9. No.2.
- Muhlis, M., & Nugroho, H. (2022). Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Indeks Harga Saham. *Journal Competency Of Business*, 6(01), 66-76.
- Musoli; Yamini, Era Agustina (2020). Peran Etika Kerja Islam Dan Keterikatan Karyawan Dalam Meningkatkan Organizational Citizenship Behaviour. *Jbti : Jurnal Bisnis : Teori Dan Implementasi*. Vol 11 No. 3

- Nugraha, P.C. (2017) Analisa Index Perhitungan Ratio Anggaran Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Periode 2007 Sampai Dengan 2011. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 5(1), 94-108.
- Putra, Windhyu. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* . Depok. Rajawali Press.
- Putri, Rizki Sari Eka Putri., & Maunandar, Agus. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*. Vol 5 No 3.
- Rahmawati, Fitri Maulidah. (2019). Aksesibilitas Permodalan Perbankan Bagi Wirausahawan Difabel Di D.I Yogyakarta Untuk Mewujudkan Ekonomi Inklusi. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 17 No.2
- Rasyid Erwin; Rahmawati, Fitri Maulidah; Sugiantoro, Hari Akbar. (2022). *Communication Structuring In Aisyiyah's Empowerment Activities In Isolated Tribal Communities*. *Jurnal Komunikator* Vol.14 No.2
- Republika. (2021). Pemkab Kulon Progo Diminta Carmat Dalam Tata Kelola Apbd. <https://www.republika.co.id/berita/qsy7sr327/pemkab-kulon-progo-diminta-cemat-dalam-tata-kelola-apbd>
- Safitri, Teti Anggita., & Fathah, Rigel Nurul. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Limbang Sukowati*. Vol (2) No (1).
- Safitri, Teti Anggita., & Fathah, Rigel Nurul. (2021). Pelatihan Pembuatan Kreasi Masker Bagi Anak Panti Asuhan Putri Aisyiyah Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* Vol.7 No.2
- Safitri, Teti Anggita. (2022). Kontribusi Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Daya Saing* Vol. 23.No.2.
- Samsudin, Agus. 2022. Community-Based Health Coverage At The Crossroad: The Muhammadiyah Health Fund In Indonesia. *Indonesian Journal Of Islam And Muslim Societies* 12(1): 111–38.
- Sari, Dyah Ratna & Retnaningdiah Diah (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Jasa Transportasi Yang Terdaftar Di Bei. *Journal Competency Of Business* Vol.5 No.2
- Sari, Imelda., Asaari, Masagus., & Hidayah, Ika Sefty Nurul. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Paper*.
- Suci, S.C., Asmara, A.(2018). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 8–22.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suyatno, Suyatno (2022). Kelembagaan Dan Potensi Lokal Dalam Mendukung Umkm Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Nusantara Hasana Jurnal*, Vol.2, No.1
- Syamsudin, Cahya, B. T., & Dewi, S. N. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan. *Jurnal Indonesia*

Membangun, 17(1), 15–27.

Talumewo, K. D. K. S., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02), 1–11.

Widiyaningsih, Vitalis Ari., & Prihatiningsih, Margaretha. (2021). *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*

Yamini, E. A. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Memilih Rumah Sakit Di Kota Yogyakarta. *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(1), 131–140.